

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa konflik Aceh, kondisi dan situasi di berbagai sektor kehidupan terganggu, mencekam, dan sangat memprihatinkan. Pada sektor pendidikan di Provinsi Aceh sangat terganggu baik secara fisik maupun secara nonfisik, seperti banyak gedung sekolah yang dibakar, pendidik dan tenaga kependidikan diteror ada yang dibunuh dan ada yang dihentikan pekerjaannya untuk mendidik siswa di sekolah. Proses pembelajaran dan manajemen di satuan pendidikan tidak berjalan sebagai mana mestinya. Kondisi tersebut semata-mata dipengaruhi oleh dampak konflik yang terjadi di Aceh. Pendidik dan tenaga kependidikan mengalami hambatan dalam melaksanakan tugasnya dan sering menerima berbagai gangguan baik secara individu maupun kelompok di satuan pendidikan masing-masing. Dari berbagai kondisi faktual di atas maka gangguan manajemen di satuan pendidikan sangat mempengaruhi proses pembelajaran sehingga hasil pembelajaran itu sendiri sangat mengecewakan.

Manajemen yang diharapkan di satuan pendidikan adalah penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluasan kepada satuan pendidikan, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (*stakeholders*) lainnya untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan untuk

mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan keinginan dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau stakeholders yang ada.

Dari sekian lama terjadi konflik (sejak 1973) di Aceh yang mengakibatkan masyarakat resah serta pembangunan di sektor pendidikan khususnya terkendala. Kondisi tersebut diakhiri dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia. MoU yang ditandatangani oleh pihak RI diwakili oleh Hamid Awaluddin sebagai Menkumham RI dengan Malek Mahmud di pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang disaksikan oleh Martti Ahtisari mantan Presiden Finlandia. Dampak kesepakatan tersebut sangat memberikan dukungan terhadap partisipasi *stakeholders* untuk memberikan kepedulian terhadap satuan pendidikan.

Pasal (323) MoU Helsinki mengamanatkan: "Pemerintah RI dan Kewenangan Aceh akan mengambil langkah-langkah untuk membantu orang-orang yang telah berpartisipasi dalam kegiatan gerakan Aceh Merdeka untuk memfasilitasi dalam rangka reintegrasi mereka ke masyarakat sipil. Selanjutnya pada pasal (4.1) mengamanatkan semua tindakan kekerasan antar pihak-pihak akan berakhir terbaru pada saat penandatanganan MoU ini.

Otonomisasi sekolah yang dipayungi oleh Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diamanatkan oleh beberapa dasar hukum di antaranya: Undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) secara jelas menyebutkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan pola pembinaan sekolah/lembaga pendidikan di Indonesia. Demikian juga Undang-Undang Sistem Pendidikan Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal (51) secara

tegas dinyatakan "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah" (ayat 1). Hal ini juga lebih didukung oleh adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang bahwa secara langsung atau tidak, daerah dan sekolah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan secara otonomi dan bertanggung jawab. Di samping itu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 pasal (3) Badan Hukum Pendidikan menyatakan bahwa Badan Hukum Pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomisasi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluasan-keluasan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan), dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dsb.), untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan keinginan dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau *stakeholders* yang ada.

Manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerja sama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola,

memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, meningkatkan kepedulian warga sekolah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya, serta meningkatkan kompetensi yang sehat antarsekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dan pemerataan pendidikan di daerah tempat operasionalnya satuan pendidikan

Penjaminan Mutu Pendidikan (*Quality Assurance*) merupakan serangkaian proses yang saling terkait dan sistem untuk mengumpulkan, menganalisis, dan membuat laporan tentang data tentang kinerja dan mutu dari tenaga, program dan lembaga pendidikan. Proses penjaminan mutu mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai (*areas of achievement*) dan prioritas-prioritas peningkatan mutu (*Quality improvement*) yang memberikan data untuk mengambil keputusan berbasis data dan membantu membangun budaya mutu berkelanjutan.

Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan MBS pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kabupaten pidie, maka kami mengkaji lebih otentik terhadap masalah ini, sehingga ditetapkan judul laporan penelitian ini ***”Penerapan MBS dalam Rangka Penjaminan Mutu Pendidikan Pasca MoU Helsinki pada SMPN di Kabupaten Pidie”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat pemahaman warga sekolah tentang RPS pada SMP di Kabupaten Pidie Pasca MoU Helsinki?
2. Bagaimanakah mekanisme penyusunan RPS pada SMP di Kabupaten Pidie Pasca MoU Helsinki?
3. Bagaimanakah pemberdayaan RPS pada SMP di Kabupaten Pidie Pasca Helsinki?
4. Bagaimanakah pengembangan RPS pada SMP di Kabupaten Pidie guna penjaminan mutu pendidikan Pasca MoU Helsinki?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Tingkat pemahaman warga sekolah dan warga masyarakat tentang RPS pada SMP di Kabupaten Pidie;
2. Mekanisme penyusunan RPS pada SMP di Kabupaten Pidie
3. Pemberdayaan RPS pada SMP di Kabupaten Pidie
4. Pengembangan RPS pada SMP Negeri di Kabupaten Pidie.

BAB II

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

A. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Depdiknas (2001:3) menyebutkan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan suatu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah, guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

Menurut Guide (1993:43) manajemen berbasis sekolah merupakan sebuah strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pelimpahan kewenangan dalam membuat keputusan dari pemerintah pusat kepada pihak sekolah. Manajemen berbasis sekolah memungkinkan kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua untuk dapat memberikan control terhadap proses pendidikan lebih optimal karena mereka diberikan tanggung jawab membuat keputusan tentang anggaran, ketenagaan, dan kurikulum. Melalui pelibatan semua pihak dalam membuat keputusan-keputusan, diharapkan dapat menciptakan iklim belajar siswa yang lebih efektif.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) dan bukti-bukti empirik tentang kurang efektif dan efisiensinya manajemen berbasis pusat, maka Departemen Pendidikan Nasional melakukan pergeseran pendekatan manajemen, yaitu dari pendekatan manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah.

Pada dasarnya manajemen berbasis sekolah dijiwai oleh pola baru manajemen pendidikan masa depan sebagaimana yang dijelaskan di atas. Manajemen berbasis sekolah didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan partisipatif untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Karena itu, esensi manajemen berbasis sekolah adalah otonomi sekolah dan pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran penjaminan mutu sekolah.

B. Fungsi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

1. Perencanaan

Sekolah diberikan kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud, misalnya kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. Oleh karena itu, sekolah harus melakukan analisis kebutuhan (*need assessment*).

Dari hasil kebutuhan analisis inilah kemudian sekolah membuat rencana peningkatan mutu. Sekolah diberikan wewenang untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan misalnya dengan melaksanakan evaluasi, khususnya evaluasi yang dilakukan secara internal.

2. Pengelolaan Kurikulum

Acuan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah pusat adalah kurikulum standar minimal yang berlaku secara nasional. Padahal kondisi sekolah pada

umumnya sangat beragam. Oleh karena itu dalam penerapannya sekolah dapat melakukan pengembangan semaksimal mungkin, namun tidak boleh mengurangi panduan pengembangan kurikulum yang berlaku secara nasional. Selain itu, sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum dan muatan lokal.

3. Pengelolaan Proses Belajar Mengajar

Sekolah diberikan kebebasan untuk memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, siswa, guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah

Secara umum, strategi, metode, dan teknik pembelajaran dan pengajaran yang berorientasi pada siswa (*student centered*) lebih mampu memberdayakan pembelajaran siswa.

4. Pengelolaan Ketenagaan

Pengelolaan ketenagaan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, reward, dan punishment, hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja sumber daya manusia di sekolah dapat dilakukan oleh sekolah, kecuali yang menyangkut jasa dan rekrutmen guru pegawai negeri, yang sampai saat ini masih ditangani secara birokrasi.

5. Pengelolaan Fasilitas (sarana dan prasarana)

Pengelolaan fasilitas sudah seharusnya dilakukan oleh sekolah, mulai dari pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan, hingga sampai pengembangan. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas

baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhirannya, terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran.

6. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Hal ini juga disadari bahwa sekolah yang paling mengetahui dan memahami kebutuhannya, sehingga desentralisasi pengelolaan keuangan sudah seharusnya dilimpahkan ke sekolah. Sekolah juga harus diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah

7. Pelayanan Siswa

Pelayanan siswa dilakukan, mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan atau pembinaan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja, hingga sampai pada alumni sebenarnya dari dahulu memang sudah didesentralisasikan. Karena itu, yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya.

8. Hubungan Sekolah-Masyarakat

Hubungan sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat. Dengan demikian, manajemen berbasis sekolah mendorong profesionalisme warga sekolah sebagai pengelola pendidikan di sekolah.

C. Rencana Pengembangan Sekolah

Rencana pengembangan sekolah merupakan rencana yang secara komprehensif memperhatikan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal, dan kemudian mencari dan menemukan strategi dan program-program untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki, mengatasi tantangan dan kelemahan yang ada, guna, mencapai visi yang diinginkan.

Dalam rencana pengembangan sekolah harus tergambar secara jelas:

1. Visi sekolah yang menunjukkan gambaran sekolah di masa datang (jangka panjang) yang diinginkan.
2. Misi sekolah yang merupakan tindakan/upaya untuk mewujudkan visi sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Tujuan pengembangan sekolah yang merupakan apa yang ingin dicapai dalam upaya pengembangan sekolah dalam kurun waktu jangka menengah, misalnya untuk 3 s.d. 6 tahun.
4. Tantangan nyata, yaitu kesenjangan (gap) dari tujuan yang diinginkan dan kondisi sekolah saat ini. Dengan demikian tantangan nyata itulah yang sebenarnya harus diatasi oleh sekolah.
5. Sasaran pengembangan sekolah, yaitu apa yang diinginkan sekolah untuk jangka pendek, misalnya untuk satu tahun.

6. Identifikasi fungsi-fungsi yang berperan penting dalam pencapaian sasaran tersebut.
7. Analisis SWOT terhadap fungsi-fungsi tersebut, sehingga ditemukan kekuatan (*strength*); kelemahan (*weakness*), peluang (*oportunity*) dan ancaman (*threat*) dan setiap fungsi yang telah diidentifikasi sebelumnya.
8. Identifikasi alternatif langkah untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dengan memanfaatkan, kekuatan dan peluang yang dimiliki sekolah.
9. Rencana dan program sekolah yang dikembangkan dari alternatif yang terpilih, guna mencapai sasaran yang ditetapkan.

1. Merumuskan Visi Sekolah.

Visi sekolah harus tetap berada dalam koridor kebijakan pendidikan nasional. Artinya visi suatu sekolah harus mengacu kepada kebijakan umum pendidikan yang telah ditetapkan secara nasional. Hal itu penting dipahami untuk menghindari terjadinya kekeliruan bahwa sekolah "bebas" menentukan visinya dan tidak terkait dengan kebijakan pihak lain. Bukankah sekolah merupakan lembaga penyelenggara pendidikan dan pendidikan itu diatur dalam suatu sistem pendidikan nasional? Jadi, tentu sekolah harus berada dalam koridor sistem pendidikan nasional tersebut. Sebagai contoh, Indonesia menganut adanya kurikulum nasional. Jadi, setiap sekolah harus menggunakan kurikulum tersebut, dengan pemahaman sebagai kurikulum minimal. Namun sekolah memiliki "ruang gerak" untuk menjabarkan lebih lanjut, agar pelaksanaannya sesuai dengan kondisi sekolah. Misalnya, menambah

kompetensi dasar yang perlu dicapai, dengan muatan lokal, dan mengatur proses pembelajaran sebagai jabaran kurikulum.

Visi pada umumnya dirumuskan dengan kalimat yang filosofis, bahkan seringkali mirip sebuah slogan. Sering pula dirumuskan dalam bentuk kalimat yang khas, mudah diingat dan terkait dengan istilah tertentu. Misalnya, sebuah sekolah yang kebetulan berlokasi di perkotaan merumuskan visinya: "unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa", sedangkan sekolah lain yang kebetulan berlokasi di daerah pedesaan merumuskan visinya: "Beriman, terdidik, dan berbudaya". Kedua visi tersebut berbeda tetapi semuanya benar. Keduanya cukup singkat dan mampu memberi gambaran karakteristik sekolah yang diinginkan di masa datang. Keduanya juga tidak menyimpang dari koridor pendidikan nasional, karena pendidikan yang unggul, berdasarkan pada iman, takwa, budaya bangsa memang merupakan prinsip-prinsip pendidikan nasional.

Yang mungkin masih perlu dilacak pada kedua visi tersebut adalah, apakah memang benar-benar sesuai dengan potensi sekolah setempat serta harapan masyarakat yang dilayani.

Dari uraian di atas serta kedua contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan visi yang baik seharusnya memberikan isyarat:

- a. berorientasi ke masa depan, untuk jangka waktu yang lama;
- b. menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik, sesuai dengan norma dan harapan masyarakat; dan

- c. mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai;
- d. mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat dan komitmen warga;
- e. mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan sekolah ke arah yang lebih baik;
- f. menjadi dasar perumusan misi dan tujuan sekolah.

Sebagaimana disebutkan terdahulu, visi yang dirumuskan dengan kalimat yang mengandung nilai-nilai filosofis perlu diberikan indikatornya. Misalnya, apakah indikator sekolah yang "unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa" tersebut. Indikator sebaiknya mencakup segala aspek pokok yang diimajinasikan. Sebagai contoh, visi "unggul prestasi berdasarkan iman dan takwa" memiliki indikator:

- a. unggul dalam peningkatan skor (*gain score achievement-GSA*);
- b. unggul dalam peningkatan pencapaian ketuntasan kompetensi;
- c. unggul dalam berbagai lomba karya ilmiah remaja;
- d. unggul dalam kegiatan keagamaan;
- e. unggul dari prestasi olah raga;
- f. unggul dari prestasi kesenian;
- g. memiliki lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif untuk belajar;
- h. mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Setelah visi dirumuskan dengan indikator yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya baru dirumuskan merumuskan misi sekolah.

2. Menyusun Misi Sekolah

Misi adalah tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi, misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Sebagai contoh sekolah 'X' merumuskan misinya sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- b. menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah;
- c. mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal;
- d. menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya bangsa, sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak;
- e. menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan komite sekolah.

3. Merumuskan Tujuan Sekolah

Bertolak dari visi dan misi, selanjutnya sekolah merumuskan tujuan. Jika visi dan misi terkait dengan jangka waktu yang sangat panjang, maka tujuan dikaitkan dengan jangka waktu menengah. Dengan demikian tujuan pada dasarnya merupakan tahapan atau langkah untuk mewujudkan visi sekolah yang telah dicanangkan. Sebaiknya tujuan tersebut dikaitkan dengan siklus program sekolah, misalnya untuk jangka 3 (tiga) tahunan, yaitu siklus pendidikan di SMP atau SMA. Jika itu dianggap terlalu pendek dapat juga untuk 2 (dua) siklus program sekolah yang berarti 6 (enam) tahun.

Jika visi merupakan gambaran sekolah yang baik untuk masa depan secara ideal, maka tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun mungkin belum selengkap visi. Dengan kata lain, tujuan dapat berwujud sebagian dari visi.

4. Menentukan Sasaran Sekolah

Rencana tahunan merupakan penjabaran dari tujuan sekolah yang telah dirumuskan berdasarkan kesenjangan yang terjadi antara kondisi sekolah saat ini dengan tujuan sekolah untuk 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun ke depan. Kesenjangan itu disebut juga tantangan nyata sekolah. Jadi, tantangan nyata adalah selisih antara tujuan yang diinginkan dengan kenyataan yang ada saat ini.

Berdasarkan pada tantangan nyata tersebut, selanjutnya dirumuskan sasaran mutu yang akan dicapai oleh sekolah. Sasaran harus menggambarkan penjaminan mutu dan kualitas yang ingin dicapai dan terukur agar mudah melakukan evaluasi keberhasilannya. Meskipun sasaran dirumuskan berdasarkan tantangan nyata yang

dihadapi oleh sekolah, namun perumusan sasaran tersebut harus tetap mengacu pada visi, misi, dan tujuan sekolah. Untuk itu setiap sekolah harus memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah sebelum merumuskan sasarannya.

Sasaran dapat disebut juga tujuan jangka pendek atau tujuan situasional sekolah. Sebutan tujuan situasional mengingatkan bahwa tujuan sekolah dirumuskan dengan bertolak dari hasil pengamatan atas situasi sekolah. Keterangan situasi memberitahukan tantangan nyata yang dihadapi oleh sekolah saat ini. Dengan latar belakang seperti itu, maka yang dimaksud dengan sasaran/tujuan situasional adalah tujuan yang dirumuskan dengan memperhitungkan tantangan yang nyata dihadapi oleh sekolah.

5. Menyusun Program Penjaminan Mutu

Langkah-langkah pemecahan persoalan yang ada, kepala sekolah bersama-sama dengan unsur komite sekolah, menyusun dan merealisasikan rencana dan program untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rencana yang dibuat harus menjelaskan secara detil dan lugas tentang aspek-aspek penjaminan mutu yang ingin dicapai, kesepakatan yang harus dilakukan, siapa yang harus melaksanakan, kapan dan di mana dilaksanakan, dan berapa biaya yang diperlukan. Hal itu juga diperlukan untuk memudahkan sekolah dalam menjelaskan dan memperoleh dukungan dari pemerintah maupun orang tua peserta didik, baik secara moral maupun finansial untuk melaksanakan perencanaan penjaminan mutu pendidikan.

BAB III

PROSEDUR PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survey-deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode mengkaji, mengamati dan menggambarkan suatu masalah yang terjadi pada suatu tempat.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SMP Negeri di Kabupaten Pidie yang berjumlah 51 sekolah. Karena populasi homogen, maka dari 51 SMP Negeri 6 diantaranya dijadikan yang masing-masing 2 SMP Negeri yang terakreditasi A, 2 SMP Negeri terakreditasi B dan 2 SMP yang belum terakreditasi.

Penetapan sampel penelitian ini dengan teknik "*Proportional Random Sampling*". Pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut:

- (1) pengelompokan SMP Negeri berdasarkan tipe sekolah, tingkat akreditasi sekolah, dan kualifikasi sekolah: yaitu tipe A (papan atas), tipe B (papan tengah), dan tipe C (papan bawah);
- (2) dari hasil pemilihan secara acak proporsional terpilih 6 SMP Negeri yaitu: SMP Negeri 1 Sigli, SMP Negeri 1 Mutiara, SMP Negeri 1 Caleue, SMP Negeri 1 Blang Malu, SMP Negeri Laweng dan SMP Negeri Tiro Kabupaten Pidie.
- (3) setiap SMP terpilih diambil 6 orang responden yaitu: kepala sekolah 1 orang; perwakilan pengawas (tendik) 1 orang, perwakilan guru 1 orang; perwakilan tata usaha 1 orang; perwakilan siswa 1 orang; dan perwakilan komite sekolah 1

orang. Jumlah akhir diperoleh 36 orang yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga instrumen dalam bentuk:

- (1) tes tertulis yang berbentuk pilihan ganda untuk mengukur pemahaman tentang RPS;
- (2) kuisioner berbentuk Skala Likert untuk mengukur mekanisme penyusunan dan pelaksanaan RPS;
- (3) ceklis dokumen untuk mengukur dokumen RPS.

Penyusunan instrumen penelitian, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) menjabarkan variabel penelitian secara operasional, yaitu menjabarkan variabel penelitian menjadi konstruk-konstruk;
- (2) mengembangkan konstruk-konstruk yang sudah dijabarkan menjadi indikator untuk disusun menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan;
- (3) berkonsultasi dan mendiskusikan dengan tim pembahas untuk memperoleh masukan apakah indikator-indikator yang dikembangkan sudah rasional;
- (4) mengadakan telaah kualitatif untuk melihat keterandalan instrumen.

Setelah instrumen penelitian disusun, selanjutnya dilakukan telaah kualitatif untuk melihat keterandalan instrumen. Telaah kualitatif dilakukan oleh tim peneliti dengan melihat materi, konstruksi, dan bahasa pada instrumen. Setelah ditelaah meminta penetapan kelayakan kepada pembahas dan pakar. Dengan demikian,

instrumen tersebut sudah memiliki validasi isi. Instrumen ini tidak ditelaah secara kuantitatif (uji coba) karena keterbatasan dana dan waktu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjangkau data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan metode dan teknik yang mampu mengungkapkan data yang memadai dan relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Untuk memenuhi kriteria tersebut dalam penelitian ini dipergunakan metode survei, dan teknik pengumpulan data dengan tes, kuesioner, dan telaah dokumen.

E. Teknik Analisis data

Sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah teknik prosentase dengan kriteria:

Amat baik 76% s .d. 100%
Baik56% s.d. 75%
Cukup 26% s.d. 55%
Rendah 0 s.d. 25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pemahaman warga sekolah dan warga masyarakat tentang RPS

Instrumen pemahaman warga sekolah dan warga masyarakat tentang RPS terdiri dari 15 butir pertanyaan dengan rentang skor 0-1, skor maksimal 15, dan skor minimal 0.

Skor pemahaman warga sekolah dan warga masyarakat dengan jumlah data 36 adalah sebagai berikut:

- 1) Skor pemahaman kepala sekolah tentang RPS dengan jumlah data 6, rentang skor terendah 4 dan skor tertinggi 10, dengan tingkat pemahaman sebesar 57%.
- 2) Skor pemahaman guru tentang RPS dengan jumlah data 6, rentang skor terendah 4 dan skor tertinggi 10, dengan tingkat pemahaman sebesar 66%.
- 3) Skor pemahaman siswa terhadap RPS dengan jumlah data 6, rentang skor terendah 4 dan skor tertinggi 8, dengan tingkat pemahaman sebesar 59%.
- 4) Skor pemahaman tata usaha terhadap RPS dengan jumlah data 6, rentang skor terendah 3 dan skor tertinggi 10, dengan tingkat pemahaman sebesar 55%.
- 5) Skor pemahaman komite sekolah terhadap RPS; dengan jumlah data 6, rentang skor, terendah 4 dan skor tertinggi 11, dengan tingkat pemahaman sebesar 59%.

Rata-rata skor tingkat pemahaman 1 warga sekolah dan warga masyarakat terhadap RPS sebesar 59,20%

2. Mekanisme Penyusunan RPS

Instrumen mekanisme penyusunan RPS terdiri dari 15 pernyataan dengan rentang skor 1-5. skor tertinggi 75, dan skor terendah 15.

Skor mekanisme penyusunan RPS dengan jumlah data 36, rentang skor terendah 23 dan skor tertinggi 29, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Skor mekanisme penyusunan RPS oleh kepala sekolah dengan jumlah data 10, rentang skor terendah 33 dan skor tertinggi 40, dengan kesesuaian mekanisme penyusunan RPS sebesar 82%.
- 2) Skor mekanisme penyusunan RPS oleh guru dengan jumlah data 10, rentang skor terendah 34 dan skor tertinggi 41, dengan mekanisme penyusunan RPS sebesar 82%.
- 3) Skor mekanisme penyusunan RPS oleh siswa. dengan jumlah data 10, rentang skor terendah 33 dan skor tertinggi 40, dengan kesesuaian mekanisme penyusunan RPS sebesar 80%.
- 4) Skor mekanisme penyusunan RPS oleh tata usaha dengan jumlah data 10, rentang skor terendah 34 dan skor tertinggi 41, dengan kesesuaian mekanisme penyusunan RPS sebesar 83%.
- 5) Skor mekanisme penyusunan RPS oleh komite sekolah dengan jumlah data 10, rentang skor terendah 34 dan skor tertinggi 40, dengan kesesuaian mekanisme penyusunan RPS sebesar 83%.

Rata-rata skor kesesuaian mekanisme penyusunan RPS sebesar 82,00%.

3. Femberdayaan RPS

Instrumen pemberdayaan RPS terdiri dari 15 butir pernyataan dengan rentang skor 1-5, skor tertinggi 75, dan skor terendah 15.

Skor pemberdayaan RPS dengan jumlah data 50, rentang skor terendah 28 dan skor tertinggi 44, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Skor pemberdayaan RPS oleh kepala sekolah dengan jumlah data 10, rentang skor terendah 34 dan skor tertinggi 43, dengan pemberdayaan RPS sebesar 81%.
- 2) Skor pemberdayaan RPS oleh guru dengan jumlah data 10, rentang skor terendah 31 dan skor tertinggi 43, dengan tingkat pemberdayaan RPS sebesar 85%.
- 3) Skor pemberdayaan RPS oleh siswa dengan jumlah data 10, rentang skor terendah 28 dan skor tertinggi 43, dengan tingkat pemberdayaan RPS sebesar 80%.
- 4) Skor pemberdayaan RPS oleh tata usaha dengan jumlah data 10, rentang skor terendah 32 dan skor tertinggi 41, dengan tingkat pemberdayaan RPS sebesar 88%.
- 5) Skor pemberdayaan RPS oleh komite sekolah dengan jumlah data 10, rentang skor terendah 28 dan skor tertinggi 44, dengan tingkat pemberdayaan RPS sebesar 86%.

Rata-rata skor tingkat pemberdayaan RPS sebesar 84,00%

4. Pengembangan RPS

Instrumen pengembangan RPS terdiri dari 15 pernyataan yang dikelompokkan menjadi 8 komponen dengan bobot yang berbeda. Rentang skor 1-3, skor terendah 0 dan skor tertinggi 245.

Skor pengembangan RPS dengan jumlah data 6, rentang skor terendah 119 dan skor tertinggi 270, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Skor komponen visi, misi, dan tujuan dengan jumlah data 3, rentang skor terendah 10,66 dan skor tertinggi 19.

- 2) Skor tantangan nyata sekolah dengan jumlah data 3, rentang skor terendah 0 dan skor tertinggi 21.
- 3) Skor sasaran sekolah dengan jumlah data 3, rentang skor terendah 7 dan skor tertinggi 7.
- 4) Skor trasil analisis SWOT dengan jumlah data 3, rentang skor terendah 7,5 dan skor tertinggi 20.
- 5) Skor langkah-langkah pemecahan masalah dengan jumlah data 3, rentang skor terendah 8 dan skor tertinggi 16.
- 6) Skor rencana dan program penjaminan mutu dengan jumlah data 3, rentang skor terendah 12 dan skor tertinggi 17.
- 7) Skor jadwal dan rencana anggaran jumlah data 3, rentang skor terendah 7 dan skor tertinggi 19,5.
- 8) Skor kelengkapan persetujuan (tanda tangan) jumlah data 3, rentang skor terendah 6 dan skor tertinggi 18

Rata-rata skor pengembangan RPS sebesar 48,99%.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pemahaman warga sekolah dan warga masyarakat tentang RPS

Pertanyaan penelitian yang akan diuji adalah bagaimana tingkat pemahaman warga sekolah dan warga masyarakat tentang RPS? Dari hasil analisis yang terangkum pada tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman warga sekolah dan warga masyarakat tentang RPS sebesar 59,20%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman warga sekolah dan warga masyarakat berada pada peringkat baik.

2. Mekanisme penyusunun RPS.

Dari hasil analisis yang terangkum dapat diketahui bahwa tingkat kesesuaian mekanisme penyusunan RPS sebesar 82,00%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian mekanisme penyusunan RPS berada pada tingkat amat baik.

3. Pemberdayaan RPS

Dari hasil analisis, yang terangkum dapat diketahui bahwa tingkat pemberdayaan RPS sebesar 86,00%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemberdayaan RPS berada pada tingkat amat baik.

4. Deskripsi Pengembangan RPS

Pertanyaan penelitian yang akan diuji adalah bagaimana pengembangan RPS? Hasil analisis yang terangkum, dapat diketahui tingkat pengembangan RPS sebesar 48,99%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengembangan RPS berada pada tingkat rendah.

Dari hasil analisis yang telah dihasilkan menggambarkan variabel tingkat pemahaman warga sekolah dan warga masyarakat untuk RPS sebesar 59,20%, variabel mekanisme penyusunan RPS sebesar 82,00%, variabel pemberdayaan RPS sebesar 84,00%, dan variabel pengembangan RPS sebesar 48,99%. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa:

1. Tingkat pemahaman warga sekolah dan warga masyarakat tentang RPS dikelompokkan dalam kategori baik.
2. Mekanisme penyusunan RPS dikelompokkan dalam kategori amat baik,
3. Pemberdayaan RPS dikelompokkan dalam kategori amat baik.
4. Pengembangan RPS dikelompokkan dalam kategori cukup.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingkat pemahaman warga sekolah dan warga masyarakat terhadap RPS diperoleh hasil rata sebesar 59,20%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman warga sekolah dan warga masyarakat tentang RPS pada SMP Negeri di Kabupaten Pidie dapat dikategorikan memadai.
2. Mekanisme penyusunan RPS diperoleh hasil rata-rata sebesar 82,00%. Dengan demikian, dapat digambarkan bahwa mekanisme penyusunan RPS pada SMP Negeri di Kabupaten Pidie rata-rata amat baik.
3. Tingkat pemberdayaan RPS diperoleh hasil sebesar 86,00%. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa tingkat pemberdayaan RPS pada SMP Negeri di Kabupaten Pidie amat baik.
4. Pengembangan RPS diperoleh hasil sebesar 48,99%, dengan demikian dapat digambarkan bahwa pengembangan RPS pada SMP Negeri di Kabupaten Pidie pada peringkat cukup

B. Rekomendasi

1. Partisipasi aktif pemangku kepentingan perlu digalakkan sehingga penjaminan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan menjadi komitmen bersama.
2. Pemahaman warga sekolah, dan warga masyarakat tentang RPS perlu ditingkatkan.
3. Perlu diadakan workshop tentang pengembangan RPS
4. LPMP NAD agar mengadakan penelitian lanjutan tentang penjaminan mutu pendidikan (*Quality Assurance*) dengan penerapan MBS secara menyeluruh di Aceh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, Suharsimi. 1999. Manajemen Berbasis Sekolah. Bentuk Inovasi Muthakhir dalam Penyelenggaraan Sekolah. Dinamika Pendidikan I.
- Bush, Tony & Coleman Marianne. 2001. Leadership and Strategic Management. London: Paul chapman Publishing.
- Cotton, Kathleen. 1998. School-Based Management 4. Diambil pada tanggal 7 Oktober 2004 dari <http://www.nv/rel/org/scpd/sirs/topsyng.htm>.
- Depdikbud.1989. Panduan Manajemen Sekolah. Jakarta Depdikbud.
- Depdiknas 2005. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: Depdiknas.
- Griffin, W Ricky & Gregory Moorhead. 1986. Organizational Behavior, Boston:Houghton Mifflin Company.
- Haris. 2001. Pengembangan Sekolah Melalui Partisipasi Masyarakat Sebuah Kajian Operational Tingkat Sekolah. Mkalah disampaikan pada seminar Pemberdayaan Masyarakat dalam pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.
- Indrianto, Bambang. 2002. Manajemen Berbasis Sekolah Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Makalah disampaikan dalam seminar “ Strategi Pembelajaran Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi di Bidang Pendidikan di Universitas Negeri Yokyakarta.
- Jalal, Pasli dan Dedi Supriadi. 2001. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusantara.
- Matthew, B.Miles & A.Michael Hubermen.1984. Qualitative Data Analisis. Newburry Park London:Sage Publication, Inc
- Moleong, Laxy J.2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:PT Remaja Rosada Karya
- Mohnnan, Susan Albers.1994. School-Based Management Organising for High Performance. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Oakland, John S. 1993. Total Quality Management. London:Butterworth Heinewann.
- Undang-undang No 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Depkumham
- Permendiknas tentang standar nasional pendidikan



**PENERAPAN MBS DALAM RANGKA PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN PASCA MOU HELSINKI
PADA SMP NEGERI DI KABUPATEN PIDIE**

LAPORAN HASIL PENELITIAN

*Dalam Rangka Mengikuti Forum Ilmiah Widyaiswara dan
Tenaga Fungsional P4TK, LPMP dan BP-PLSP Tahun 2010*

Oleh:

DRS. H. T. HASANUDDIN, M.SI. (WI UTAMA)

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
2010**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Jl. Banda Aceh-Medan Km. 12,5 Desa Niron Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar 23361
Telp. (0651) 7556303, 7556304 Fax (0651) 7556305, 43779, <http://www.lmpnad.com> Email: lmpnad@yahoo.com

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul: Penerapan MBS dalam Rangka Penjaminan Mutu Pendidikan Pasca MoU Helsinki pada SMPN di Kabupaten Pidie.
2. Peneliti : Tim LPMP Aceh
 1. Drs. H. T. Hasanuddin, M.Si. (WI Utama)
 2. Drs. H. Moejiono (WI Madya)
 3. Drs. M. Yusuf Wahab (WI Madya)
 4. Drs Amiruddin, M.Pd. (WI Muda)
3. Jangka Waktu Penelitian : 3 (bulan)
4. Bentuk kegiatan : Penelitian
5. Tujuan Penelitian : Temu Karya LPMP Se-Sumatera yang dilaksanakan tanggal 03 s.d 07 Maret 2010 di LPMP Provinsi Bangka Belitung

Banda Aceh, 25 Februari 2010
Kepala,

Drs. Makmun Ibrahim, M.M.
NIP 131408521

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan izin-Nyalah kami telah dapat menyelesaikan laporan penelitian berjudul “ Penerapan MBS dalam Rangka Penjaminan Mutu Pendidikan Pasca MoU Helsinki pada SMP di Kabupaten Pidie” yang telah tersusun dengan baik atas kerja sama tim yang diberi kepercayaan oleh LPMP Aceh.

Laporan ini disusun berdasarkan penelitian yang dilaksanakan sejak Desember 2009 s.d Februari 2010. Penelitian yang bertujuan untuk mengkaji tentang penerapan MBS pada SMP di Kabupaten Pidie sebagai suatu penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan secara internal sehingga dapat terukur secara valid.

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan input kepada LPMP Aceh khususnya guna pelaksanaan Diklat Manajemen dimasa mendatang. Disadari bahwa masing-masing satuan pendidikan memiliki karakteristik yang relatif berbeda, tentu saja pengkajian yang lebih luas baik secara geografis, politis maupun secara substansi perlu dikembangkan lebih lanjut.

Kepada semua pihak yang telah membantu untuk kelancaran pelaksanaan penelitian ini kami menyampaikan terima kasih. Semoga laporan hasil penelitian ini bermanfaat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang merupakan tanggung jawab semua kita.

Banda Aceh, 25 Februari 2010

Tim Peneliti LPMP NAD

ABSTRAK

**PENERAPAN MBS DALAM RANGKA PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN PASCA MOU HELSINKI
PADA SMP DI KABUPATEN PIDIE
OLEH : TIM LPMP ACEH**

Penjaminan mutu pendidikan (*Quality Assurance*) merupakan proses yang saling terkait dalam suatu sistem. Proses yang dimaksud adalah proses pencapaian mutu yang dilakukan oleh pemangku kepentingan pada satuan pendidikan sehingga penjaminan mutu menjadi pemahaman dan komitmen bersama.

Sasaran penelitian ini untuk mengkaji tentang penjaminan mutu pendidikan pada SMP di Kabupaten Pidie Pasca MoU Helsinki, termasuk beberapa variabel di dalamnya, seperti pemahaman, mekanisme, pemberdayaan, dan pengembangan rencana pengembangan satuan pendidikan.

Hasil penelitian ini dapat mendeskripsikan pemahaman dan komitmen dalam upaya penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan, pemahaman warga masyarakat dan warga sekolah terhadap RPS, mendeskripsikan mekanisme penyusunan RPS, pemberdayaan RPS, dan Pengembangan RPS pada SMP di Kabupaten Pidie.

Penelitian ini dilakukan pada SMP di Kabupaten Pidie, dengan pengambilan sampel dengan teknik *Stratified Proportional Random Sampling*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dan desain deskriptif. Data dijangkau dengan menggunakan 3 instrumen yaitu instrumen bentuk tes tertulis, instrumen dalam bentuk kuesioner skala likert, dan instrumen ceklis dokumen. Instrumen penelitian didasarkan pada validasi isi. Keterandalan dilakukan dengan telaah kualitatif dan pendapat ahli menggunakan analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa penjaminan mutu pendidikan dengan melibatkan secara aktif pihak pemangku kepentingan dapat memahami dan dapat membangun komitmen bersama. Beberapa variabel lain yang diteliti menyimpulkan bahwa pada SMP di Kabupaten Pidie tergambar: pemahaman warga sekolah dan warga masyarakat terhadap RPS pada kategori memadai (59.20%), mekanisme penyusunan RPS berkategori amat baik (82.00%), pemberdayaan RPS diperoleh hasil amat baik (84.00%), dan pengembangan RPS diperoleh hasil masih rendah (48.99%).

Kata kunci: *Penjaminan mutu, MBS, RPS, Pemberdayaan, Pemahaman, Pengembangan*

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
BAB II IMPLIKASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH	6
A. Konsep Dasar MBS	6
B. Fungsi MBS	7
C. Rencana Pengembangan sekolah	10
BAB III PROSEDUR PENELITIAN	17
A. Metode dan Pendekatan Penelitian	17
B. Populasi dan Sampel Penelitian	17
C. Instrumen Penelitian	18
D. Teknik Pengumpulan Data	19
E. Teknik Analisis Data	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	20
A. Hasil Penelitian	20
B. Pembahasan Hasil Penelitian	23
BAB IV PENUTUP	25
A. Kesimpulan	25
B. Rekomendasi	25
DAFTAR KEPUSTAKAAN	26